



**PERATURAN DESA TEMU  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN PRAMBON  
DESA TEMU**



KEPALA DESA TEMU  
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA TEMU  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMU  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TEMU

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 2730);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
  6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
  8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
  9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
  10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
  11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015

- Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
12. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
  14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
  15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
  16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
  17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
  18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50

- Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
  20. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  21. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  22. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  25. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
28. Permendes PDTT RI Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
29. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
30. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;
31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo;
32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Pedoman Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 85);
34. Peraturan Desa Temu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Temu Tahun 2019 Nomor 01;
35. Peraturan Desa Temu Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temu Tahun 2022 -2028;

36. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;
37. Peraturan Desa Temu Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Temu Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temu Tahun 2022 -2030;
38. Peraturan Desa Temu Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026;
39. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa;
40. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
41. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
42. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMU  
Dan  
KEPALA DESA TEMU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMU TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temu Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	<b>1.891.056.278,00</b>
2. Belanja Desa	Rp	<u>2.017.512.085,36</u>
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.111.737.085,36
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	539.150.000,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	153.125.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	42.500.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat, dan Mendesak Desa	Rp	171.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<b><u>2.017.512.085,36</u></b>
Surpuls/Defisit	Rp	<b>(126.455.807,36)</b>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	256.455.807,36
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	130.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	126.455.807,36
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TEMU.

Ditetapkan di : DESA TEMU

Pada tanggal : 29 Desember 2025



Diundangkan di : DESA TEMU

Pada tanggal : 29 Desember 2025

SEKRETARIS DESA TEMU

  
EDY PURWANTO

LEMBARAN DESA TEMU NOMOR 6 TAHUN 2025



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA TEMU  
KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMU  
NOMOR : 6 /BPD/XII/2025  
MENYEPAKATI PERATURAN DESA TEMU NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMU

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;  
b. Bahwa anggaran sebagaimana di maksud huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa;  
c. Bahwa untuk pengesahan Peraturan Desa perlu mendapatkan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, yang dituangkan dalam keputusan BPD Desa Temu.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
12. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
  14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
  15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
  16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
  17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
  18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);
  19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);
  20. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
21. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  22. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  25. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
  29. Permendes PDTT RI Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  30. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;

31. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;
32. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo;
33. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
34. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Pedoman Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 85);
35. Peraturan Desa Temu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Temu Tahun 2019 Nomor 01);
36. Peraturan Desa Temu Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temu Tahun 2022 -2028;
37. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo;
38. Peraturan Desa Temu Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Temu Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temu Tahun 2022 -2030;
39. Peraturan Desa Temu Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026;
40. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa;
41. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;
42. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
43. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : BPD Desa Temu menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Temu  
Kedua : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.891.056.278,00
2. Belanja Desa	Rp	<u>2.017.512.085,36</u>
• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.111.737.085,36
• Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	539.150.000,00
• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	153.125.000,00
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	42.500.000,00
• Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat, dan Mendesak Desa	Rp	171.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>2.017.512.085,36</u>
Surplus/Defisit	Rp	(126.455.807,36)
3. Pembiayaan		
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp	256.455.807,36
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	130.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	126.455.807,36
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temu  
Pada tanggal : 29 Desember 2025  
KETUA BPD DESA TEMU

  
NUR SUBKHAN

## BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Desa Temu Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Temu yang membahas tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Temu Tahun Anggaran 2026.

Hadir dalam Rapat tersebut adalah :

1. Kepala Desa Beserta Perangkat Desa,
2. Seluruh Anggota BPD, dan Pendamping Desa

Dalam Rapat tersebut telah disepakati dan selanjutnya ditetapkan Sebagai Peraturan Desa Temu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temu Tahun 2026 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp	<b>1.891.056.278,00</b>
2. Belanja Desa	Rp	<b>2.017.512.085,36</b>
• Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	1.111.737.085,36
• Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	539.150.000,00
• Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	153.125.000,00
• Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	42.500.000,00
• Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat, dan Mendesak Desa	Rp	171.000.000,00
Jumlah Belanja Surplus/Defisit	Rp	<b>2.017.512.085,36</b>
	Rp	(126.455.807,36)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	256.455.807,36
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	130.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	126.455.807,36
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temu, 29 Desember 2025  
Badan Permusyawaratan Desa Temu  
**KETUA**





## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

### DESA TEMU

Sekretariat : Jln. Untung Suropati No. 02 Desa Temu kodepos 61264  
Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo

#### DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Senin  
Tanggal : 29 Desember 2025  
Waktu : 19.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Temu  
Acara : Menyetujui dan Mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Nur Subkhan	Ketua	1
2	Dia Dwi S	Anggota	2
3	Ayu Siska L.	Secretaris	3
4	MUSI YAH	ANGGOTA	4
5			5

Temu, 29 Desember 2025

KETUA BPD DESA TEMU





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KECAMATAN PRAMBON  
DESA TEMU

Jl. Untung Suropati No. 02, Prambon Sidoarjo Kodepos 61264  
Telepon: 089519257747 Email: ds.temu@gmail.com  
Website: http://temu.desa.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Senin  
Tanggal : 29 Desember 2025  
Waktu : 19.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Temu  
Acara : Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PETTY FITRI ANNA	KADES	1
2	Edy Parwanto	Sekdes	2
3	MUCH SUNHAJ	KESKIN	3
4	ROMIANAH	Kaur Keuangan	4
5	Sukma Dwi Putra	Kaur Perekonomian	5
6	Nur Israwiyah	Kaur Pelayanan	6
7	Dic.Dwi S	Anggota BPD	7
8	Ayu Srika L.	Sekretris BPD	8
9	RADEA TRIASA	KASUNS	9
10	MUSIYAH	ANGGOTA BPD	10
11	tha Resue	Kasuh	11
12	Nurfaizia	PLD	12
13	M. KASHIFUR KHABIS	Kaur TU / umum	13
14	Supariyadi	Kasi pemerintahan	14
15	Nur Sulchan	BPD	15
16			16
17			17
18			18



LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA TEMU  
 NOMOR 06 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TEMU  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	86.477.953,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.800.578.325,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.891.056.278,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	688.247.953,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	931.429.625,36	
5.3.	Belanja Modal	226.834.507,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	171.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.017.512.085,36	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(126.455.807,36)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	256.455.807,36	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	256.455.807,36	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	130.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	130.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	126.455.807,36	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TEMU

TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	86.477.953,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.800.578.325,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.891.056.278,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.111.737.085,36</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	867.358.578,36	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	424.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	424.800.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D ll)	149.010.625,36	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	149.010.625,36	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.800.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakai Seragam, Listrik dll)	4.500.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	27.377.953,00	PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	27.377.953,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	114.270.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	114.270.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	24.834.507,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	11.834.507,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.834.507,00	
1.2.91		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service; ST NK,BPKB,dll)	13.000.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	39.994.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.494.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.494.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	25.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	33.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	6.800.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.300.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.500.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.400.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	5.000.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>146.550.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.000.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	4.650.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.000,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	135.900.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.900.000,00	
2		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>539.150.000,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>48.250.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.100.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	20.250.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>225.650.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Imsyafit)	89.350.000,00	DDS

KODE REKENING		URAJAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.350.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.900.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	105.250.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.250.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	5.000.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	11.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.2.91		Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men	8.650.000,00	DDS
2.2.91	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>250.000.000,00</b>	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	85.000.000,00	DDS
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerusan Jalan Lingkungan Permukiman **)	30.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkutan/Pengerusan Jembatan Milik Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s eloan dll)	100.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Ber sejarah	20.000.000,00	PBH
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>15.250.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	15.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.250.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>153.125.000,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pertidungungan Masyarakat	33.580.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	30.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.500.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>16.200.000,00</b>	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Mordin (Honorarium)	16.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>76.375.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	16.375.000,00	DDS

KODE REKENING		URAJAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.375.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	50.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>27.050.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.750.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	21.300.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERTERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>42.500.000,00</b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>27.500.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>171.000.000,00</b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>20.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>25.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	25.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>126.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.017.512.085,36</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(126.455.807,36)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	256.455.807,36	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	130.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>126.455.807,36</b>	

KODE REKENING	URAJAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA	
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00		



PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TEMU  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			86.477.953,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			86.477.953,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			86.477.953,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.800.878.325,00	
	4.2.1.	Dana Desa			856.319.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			856.319.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			490.104.507,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			490.104.507,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			454.154.818,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			454.154.818,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			4.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN				1.891.056.278,00	
	5.	BELANJA				
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				1.111.737.085,36	
01.01.	Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				867.358.578,36	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				72.000.000,00	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			72.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			72.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			60.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			12.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	OB	424.800.000,00	ADD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			424.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			424.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			354.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			70.800.000,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Bulan	149.010.625,36	ADD, DLL, PAD, PBH, PE
1.01.04.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			149.010.625,36	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			41.410.625,36	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			12.535.847,00	
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			3.434.778,38	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			2.540.000,00	
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pernadam Kebakaran			11.800.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.500.000,00	
1.01.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			63.600.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			51.600.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			20.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			8.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			24.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			12.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			12.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	OB	49.800.000,00	PBH
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			49.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			49.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			49.800.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaiian Seragam, Listrik dll)	12	Bulan	4.500.000,00	PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.500.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	Bulan	25.600.000,00	DDS
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.600.000,00	
1.01.08.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			8.000.000,00	
1.01.08.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			8.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			17.600.000,00	
1.01.08.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			17.600.000,00	
1.01.90.		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	12	OB	27.377.953,00	PAD, PBH
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			27.377.953,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			27.377.953,00	
1.01.90.	5.1.1.90	Tunjangan Keluarga			6.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			18.877.953,00	
1.01.90.	5.1.1.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa			2.500.000,00	
1.01.91.		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	12	Bulan	114.270.000,00	PAD, PBH
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			114.270.000,00	
1.01.91.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			114.270.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.91.	5.1.2.90	Tunjangan Keluarga			31.920.000,00	
1.01.91.	5.1.2.91	Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			67.600.000,00	
1.01.91.	5.1.2.92	Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			14.750.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			24.834.507,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1	Tahun	11.834.507,00	PBH
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			11.834.507,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			11.834.507,00	
1.02.01.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			5.000.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			6.834.507,00	
1.02.91.		Pemeliharaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan (Service;STNK;BPKB;dll)	1	Tahun	13.000.000,00	PBH
1.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.000.000,00	
1.02.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			5.000.000,00	
1.02.91.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			5.000.000,00	
1.02.91.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			8.000.000,00	
1.02.91.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			5.000.000,00	
1.02.91.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			3.000.000,00	
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			39.994.000,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	Tahun	14.494.000,00	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.494.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.244.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			294.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.500.000,00	
1.03.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.250.000,00	
1.03.02.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			1.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.000.000,00	
1.03.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			5.000.000,00	
1.03.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12	Bulan	25.500.000,00	DDS
1.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.500.000,00	
1.03.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.050.000,00	
1.03.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.750.000,00	
1.03.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
1.03.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
1.03.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.600.000,00	
1.03.05.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			1.000.000,00	
1.03.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.850.000,00	
1.03.05.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			10.850.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			33.000.000,00	
1.04.02.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguier)	1	Kegiatan	6.800.000,00	DDS
1.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.800.000,00	
1.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.650.000,00	
1.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
1.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.650.000,00	
1.04.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.650.000,00	
1.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.500.000,00	
1.04.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			2.500.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dkk)			10.300.000,00	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.300.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.300.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.000.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)			6.000.000,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.100.000,00	
1.04.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			900.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat			2.500.000,00	PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.500.000,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.500.000,00	
1.04.08.		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1	Tahun	2.400.000,00	DDS
1.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00	
1.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.400.000,00	
1.04.08.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			2.400.000,00	
1.04.11.		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	1	Kegiatan	5.000.000,00	PBH
1.04.11.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
1.04.11.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
1.04.11.	5.2.2.93	Belanja Jasa Honorarium Juri Lomba			2.000.000,00	
1.04.11.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.000.000,00	
1.04.11.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			3.000.000,00	
01.05.		Sub Bidang Pertanahan			146.550.000,00	
1.05.01.		Sertifikasi Tanah Kas Desa			6.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.000.000,00	
1.05.01.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.000.000,00	
1.05.01.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			6.000.000,00	
1.05.05.		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan			4.650.000,00	PBH
1.05.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.650.000,00	
1.05.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.650.000,00	
1.05.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
1.05.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.05.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.000.000,00	
1.05.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
1.05.91.		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			136.900.000,00	PBH
1.05.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			136.900.000,00	
1.05.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			56.000.000,00	
1.05.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			20.000.000,00	
1.05.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.000.000,00	
1.05.91.	5.2.1.90	Belanja Pendukung Kegiatan Adat/Kebudayaan/Keagamaan (Ruwat Desa /			36.000.000,00	
1.05.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.900.000,00	
1.05.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
1.05.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.000.000,00	
1.05.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			8.000.000,00	
1.05.91.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			8.000.000,00	
1.05.91.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			15.000.000,00	
1.05.91.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			15.000.000,00	
1.05.91.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.000.000,00	
1.05.91.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			10.000.000,00	
1.05.91.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			40.000.000,00	
1.05.91.	5.2.7.91	Belanja Hadiah Kegiatan			40.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			539.150.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			48.250.000,00	
2.01.01.		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakalan dkk)			14.400.000,00	DDS
2.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.400.000,00	
2.01.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.400.000,00	
2.01.01.	5.2.2.90	Belanja Jasa Pelaksana Pendidikan Desa			14.400.000,00	
2.01.02.		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)			6.500.000,00	DDS
2.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.500.000,00	
2.01.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.000.000,00	
2.01.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			5.000.000,00	
2.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			1.500.000,00	
2.01.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			1.500.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat			7.100.000,00	DDS
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.100.000,00	
2.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.850.000,00	
2.01.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
2.01.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			500.000,00	
2.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
2.01.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.250.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
2.01.03.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			250.000,00	
2.01.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
2.01.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			2.000.000,00	
2.01.10.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi			20.250.000,00	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.01.10.	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			250.000,00	
2.01.10.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			250.000,00	
2.01.10.	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00	
2.01.10.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			20.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			225.650.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)			89.350.000,00	DDS
2.02.02.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			89.350.000,00	
2.02.02.	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			28.450.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.000.000,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			26.300.000,00	
2.02.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.150.000,00	
2.02.02.	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			39.900.000,00	
2.02.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.000.000,00	
2.02.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			3.000.000,00	
2.02.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			33.900.000,00	
2.02.02.	5.2.7	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			21.000.000,00	
2.02.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			21.000.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dkk)			5.900.000,00	DDS
2.02.03.	5.2	Belanja Barang dan Jasa			5.900.000,00	
2.02.03.	5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan			2.150.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
2.02.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.02.03.	5.2.2	Belanja Jasa Honorarium			2.250.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.000.000,00	
2.02.03.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			250.000,00	
2.02.03.	5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			1.500.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan			105.250.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			105.250.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			13.950.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.350.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			850.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			750.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			10.400.000,00	
2.02.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			2.400.000,00	
2.02.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			8.000.000,00	
2.02.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			41.400.000,00	
2.02.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			500.000,00	
2.02.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			900.000,00	
2.02.04.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			40.000.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			39.500.000,00	
2.02.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			39.500.000,00	
2.02.07.		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional			6.000.000,00	DDS
2.02.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
2.02.07.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
2.02.07.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.000.000,00	
2.02.90.		Penyelenggaran Senam Desa			11.500.000,00	DDS
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.500.000,00	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.000.000,00	
2.02.90.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.000.000,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
2.02.90.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			33.500.000,00	
3.01.02.		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes			30.000.000,00	DDS
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.000.000,00	
3.01.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			30.000.000,00	
3.01.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			30.000.000,00	
3.01.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa			3.500.000,00	PBH
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.500.000,00	
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.950.000,00	
3.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
3.01.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			300.000,00	
3.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			300.000,00	
3.01.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.250.000,00	
3.01.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			1.250.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			16.200.000,00	
3.02.90.		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	1	Tahun	16.200.000,00	PBH
3.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.200.000,00	
3.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			16.200.000,00	
3.02.90.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			16.200.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			76.375.000,00	
3.03.01.		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota			16.375.000,00	DDS
3.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			16.375.000,00	
3.03.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.875.000,00	
3.03.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.375.000,00	
3.03.01.	5.2.1.08	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.13.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			15.000.000,00	
2.03.13.	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			4.500.000,00	
2.03.13.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			9.500.000,00	
2.03.13.	5.3.6.05	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan			1.000.000,00	
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)			100.000.000,00	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			100.000.000,00	
2.03.14.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			100.000.000,00	
2.03.14.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			100.000.000,00	
2.03.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah			20.000.000,00	PBH
2.03.16.	5.3.	Belanja Modal			20.000.000,00	
2.03.16.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			20.000.000,00	
2.03.16.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03.16.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			6.100.000,00	
2.03.16.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			11.000.000,00	
2.03.16.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			2.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			15.250.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)			15.250.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.250.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.000.000,00	
2.06.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			12.250.000,00	
2.06.02.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			1.800.000,00	
2.06.02.	5.2.5.92	Belanja Jasa Domain Desa			250.000,00	
2.06.02.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			10.200.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			153.125.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.90.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			3.000.000,00	
2.02.90.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Periengkapan			3.000.000,00	
2.02.91.		Dukungan Pencegahan/Penanganan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya) dan Penyakit Men			8.650.000,00	DDS
2.02.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.650.000,00	
2.02.91.	5.2.1.	Belanja Barang Periengkapan			4.150.000,00	
2.02.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
2.02.91.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.02.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
2.02.91.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
2.02.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	
2.02.91.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.000.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			250.000.000,00	
2.03.06.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan			85.000.000,00	DDS
2.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			85.000.000,00	
2.03.06.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			85.000.000,00	
2.03.06.	5.2.6.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan			85.000.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)			30.000.000,00	DDS
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			30.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			30.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			9.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			18.000.000,00	
2.03.11.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			2.250.000,00	
2.03.13.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	1	Tahun	15.000.000,00	DDS
2.03.13.	5.3.	Belanja Modal			15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			250.000,00	
3.03.01.	5.2.2.91	Belanja Jasa Honorarium Pembuka Acara			250.000,00	
3.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.750.000,00	
3.03.01.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			3.750.000,00	
3.03.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			1.500.000,00	
3.03.01.	5.2.4.03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			1.500.000,00	
3.03.02.		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa			10.000.000,00	DDS
3.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
3.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.000.000,00	
3.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			10.000.000,00	
3.03.05.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa			50.000.000,00	DDS
3.03.05.	5.3.	Belanja Modal			50.000.000,00	
3.03.05.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			50.000.000,00	
3.03.05.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			750.000,00	
3.03.05.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			17.750.000,00	
3.03.05.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			25.000.000,00	
3.03.05.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			4.000.000,00	
3.03.05.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			2.500.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			27.050.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD			5.750.000,00	PBH
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.750.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.750.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.600.000,00	
3.04.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.000.000,00	
3.04.02.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.		Pembinaan PKK		1 Tahun	21.300.000,00	PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.300.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Periengkapan			14.800.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			14.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			500.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			6.000.000,00	
3.04.03.	5.2.3.90	Belanja Bantuan Transport			6.000.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			42.500.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			27.500.000,00	
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		1 Tahun	8.000.000,00	PBH
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			6.000.000,00	
4.03.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			6.000.000,00	
4.03.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			2.000.000,00	
4.03.01.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			2.000.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		1 Tahun	12.000.000,00	PBH
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			6.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			6.000.000,00	
4.03.02.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			6.000.000,00	
4.03.02.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			6.000.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD		1 Tahun	7.500.000,00	PBH
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.750.000,00	
4.03.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			2.750.000,00	
4.03.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			4.750.000,00	
4.03.03.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			4.750.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			15.000.000,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan			15.000.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			15.000.000,00	
4.04.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			15.000.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			171.000.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			20.000.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana			20.000.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			20.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			20.000.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			20.000.000,00	
05.02.		Sub Bidang Keadaan Darurat			25.000.000,00	
5.02.00.		Penanganan Keadaan Darurat			25.000.000,00	DDS
5.02.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			25.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			25.000.000,00	
5.02.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			25.000.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			126.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak			126.000.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			126.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			126.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			126.000.000,00	
JUMLAH BELANJA					2.017.512.085,36	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
6.	SURPLUS DEFISIT				(126.455.807,36)	
	PEMBIAYAAN					
	6.1. Penerimaan Pembiayaan				256.455.807,36	
	6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya				256.455.807,36	
	6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya				256.455.807,36	
	6.2. Pengeluaran Pembiayaan				130.000.000,00	
	6.2.2. Penyertaan Modal Desa				130.000.000,00	
	6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa				130.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTO				126.455.807,36		
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				0,00		

